

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986
- Andrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ardiansyah, *Hukum Perizinan*, Deepublish, Sleman, 2023
- Ateng Syarifudin, *Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata*, Pena Media, Bandar Lampung, 2016
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945*, PT Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Deddy Supriady dan Dadang Solihin, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Van'Detta Publishing, Jonggol, 2010
- Harma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Bandung, 2004
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- I Wayan Bhayu Eka Pratama, *Model Perizinan Berbasis Resiko yang Penuh Resiko dalam UU Cipta Kerja*, Mongabay, Jakarta, 2020
- Machfud Md, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1998
- N. M. Spelt dan J. B.J. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Erlangga, Surabaya, 1992
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2006
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 2003
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*, Alqoprint, Sumedang, 2011
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- S.F Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administasi Negara*, UII Press, 2001
- Sigit Sapto Nugroho., A.T. Haryani, dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020
- Siti Kotijah, *Hukum Perizinan*, CV. MFA, Samarinda, 2020
- Siti Kotijah dan Ine Ventyrina, *Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2022
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1966
- Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan*, Ubhara Press, Surabaya, 2020

B. Jurnal

- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, Volume 1, Nomor 5, 2010, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/Sufriadi-Jurnal-Yuridis-Vol-1-No-1-Juni-2014.pdf>
- Honny David Kansil., Een N Walewangko, dan Vecky A.J Masinambow, Analisis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Ease Of Doing Business Pada Kota Manado, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Volume 25, Nomor 1, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpek/article/download/52072/44592/125100>
- Kurnianingsih., Hairul Maksum, dan Johan, Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus Di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Volume 5, Nomor 1, 2023, <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/230/170>
- Merissa Bhernaded Lie, Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia Dan Negara Indonesia, *Jurnal APHTN-HAN*, 2022, <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/30/22>
- Yunandi Permana Putra., Diani Kesuma, dan Endra Wijaya, Implementasi Dan Kendala Dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 2, 2023,

<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/6098/2764/>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617).

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah*. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618).

_____. *Peraturan Gubernur Jambi Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021. (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 31).